

Hujan, Sebabkan Longsor Material di Magelang

MAGELANG (KR) - Tanah longsor terjadi di wilayah Kabupaten Magelang, Selasa petang (1/12). Tidak ada korban dalam kejadian ini, namun ada material longsor yang sempat mengenai bangunan rumah penduduk yang ada di bawahnya.

Hal ini dibenarkan Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar) BPBD Kabupaten Magelang Drs Edy Susanto kepada wartawan. Dikatakan, material tanah longsor di Dusun Semawang Desa Balerejo Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang sempat mengenai rumah penduduk yang ada di bawahnya.

Kejadian sekitar pukul 15.00 tersebut bermula dari turunnya hujan lebat di wilayah Kecamatan Kaliangkrik Magelang sejak pukul 14.30 hingga sore. Ada drainase yang tersumbat, menyebabkan adanya luapan air di jalan

Dusun Semawang dan mengikis talud jalan. Bangunan talud tinggi sekitar 10 meter dan panjang 10 meter ambrol, dan material longsor ada yang mengenai rumah warga.

Camat Kaliangkrik Daryoko Umar Singgih SIP MM secara terpisah kepada KR, Selasa malam, menambahkan jalan setapak menuju perkampungan atau gang sempat terganggu. Karena hujan terus mengguyur hingga Selasa malam, kegiatan kerja bakti masyarakat rencana dilaksanakan Rabu pagi ini. Tanah longsor juga terjadi di wilayah Desa

Sambungrejo Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang. Hujan yang terjadi sejak pukul 14.30 diduga menjadi penyebab longornya tanah tebing tinggi sekitar 25 meter dan panjang 12 meter longsor. Informasi yang diperoleh Kalakhar BPBD Kabupaten Magelang menyebutkan dimensi ketebalan material longsor sekitar 2,5 meter. Saat ini lokasi diberi rambu darurat berupa tali pembatas.

Dari wilayah Kota Magelang juga diperoleh informasi adanya bangunan talud yang longsor. Peristiwa ini terjadi di wilayah Kelurahan Gelangan Kecamatan Magelang Tengah. Hal ini juga dibenarkan Camat Magelang Tengah Tugono SH saat dihubungi KR, Selasa petang. **(Tha)-d**

PT BANK BPD DIY LAKUKAN KERJA SAMA Berikan Layanan Perbankan bagi Pegawai Kantor Imigrasi

YOGYA (KR) - PT Bank BPD DIY bersama Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Yogyakarta melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) terkait pemanfaatan jasa layanan bank yang diselenggarakan, Senin (30/11). Dengan kerja sama ini diharapkan bisa mendatangkan manfaat bagi pegawai sehingga menunjang kinerja di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta.

Pemimpin Cabang Sleman PT Bank BPD DIY, Efendi Sutopo Yuwono menyampaikan, Bank BPD DIY selalu hadir untuk memberikan layanan jasa keuangan kepada masyarakat. Khususnya di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta baik yang bersifat perorangan maupun instansi atau perusahaan. Menurut Efendi, dalam upaya merespons perubahan era Industri 4.0 serta dalam rangka mendukung protokol Covid-



MoU antara Bank BPD DIY dan Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Yogyakarta.

19, Bank BPD DIY hadir dengan memberikan layanan digital kepada nasabah. "Kami hadir dalam penguasaan pinjaman. Saat ini masyarakat dapat mengajukan permohonan pinjaman secara online melalui aplikasi BPD DIY Kawan Usaha sehingga akan memudahkan bagi calon nasabah apabila akan mengajukan pinjaman ke Bank BPD DIY," kata Efendi saat acara MoU yang diadakan di Aula Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta Senin (30/11).

Selain BPD DIY Kawan Usaha, Bank BPD DIY telah memiliki layanan digital lainnya. Mulai dari Bank BPD DIY Mobile, Laku Pandai, Cash Management System, E-Samsat, BPD DIY Kawan Usaha. Bahkan beberapa waktu yang lalu Bank BPD DIY telah meluncurkan produk yang diberi nama QUAT Bank BPD DIY. Yaitu transaksi berbasis barcode dimana masyarakat bisa bertransaksi membeli tanpa harus menggunakan uang tunai. **(Aha)-f**

PEMBUKAAN PEMBELAJARAN TATAP MUKA

IDAI: Butuh Perhatian Ekstra

JAKARTA (KR) - Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) mengingatkan risiko terpapar terpapar Covid-19, saat pembelajaran tatap muka dibuka kembali. Apalagi kasus penyebaran Covid-19 mengalami peningkatan, sehingga membutuhkan perhatian ekstra untuk melakukan pencegahan.

Dalam pernyataan IDAI yang ditandatangani Ketua Umum Dr dr Aman B Pulungan SpA(K) FAAP FRCPI dan Sekretaris Umum Dr Hikari Ambara Sjakti SpA(K), Selasa (1/12) mengatakan satu dari sembilan kasus terkonfirmasi Covid-19 di Indonesia adalah anak usia 0-18 tahun.

Dalam penjelasannya, data tanggal 29 November 2020 menunjukkan proporsi kematian anak akibat Covid-19 di

bandingkan seluruh kasus kematian di Indonesia sebesar 3,2 persen dan merupakan tertinggi di Asia Pasifik. IDAI menilai pembukaan sekolah untuk kegiatan belajar mengajar tatap muka mengandung risiko tinggi terjadinya lonjakan kasus Covid-19 karena anak masih berada dalam masa pembentukan berbagai perilaku hidup yang baik.

"Menimbang dan memperhatikan panduan dari WHO, publikasi ilmiah, publikasi media massa, dan data Covid-19 di Indonesia maka saat ini IDAI memandang bahwa pembelajaran melalui sistem jarak jauh (PJJ) lebih aman. Keputusan membuka sekolah untuk memulai kegiatan tatap muka dapat berbeda-beda dari satu daerah lainnya di Indonesia, karena dipengaruhi

berbagai faktor. Namun demikian, sedapatnya keputusan membuka dan menutup kembali sekolah dalam waktu singkat dihindari, karena berdampak pada rutinitas keseharian anak dan keluarga," ujarnya.

Di DIY sendiri, kuat desakan untuk dibukanya sekolah untuk pembelajaran tatap muka. Namun demikian, Sekda DIY Kadamanta Baskara Aji menegaskan belum tergesa-gesa, mengingat peningkatan kasus positif Covid-19 yang cukup tinggi.

Ketua Satgas Covid-19 Ikatan Dokter Indonesia (IDI) DIY, dr Tri Widjaja SKes mengingatkan pentingnya duduk bersama segala semua pihak untuk menentukan kebijakan dan langkah yang diambil agar tidak terjadi penularan yang lebih luas Covid-19. **(Jon)-d**

PEMBUBARAN 10 LEMBAGA PEMERINTAH

Diintegrasikan, Hemat Rp 200 Miliar

JAKARTA (KR) - Presiden Joko Widodo telah menetapkan pembubaran 10 Lembaga Nonstruktural (LNS) melalui Peraturan Presiden No 112/2020. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjoe Kumolo menjelaskan, pembubaran lembaga tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya reformasi birokrasi dan tidak menyebabkan adanya tugas dan fungsi yang hilang atau tidak dilaksanakan, tetapi diintegrasikan/dilakukan oleh instansi yang dimandatkan dalam Perpres tersebut.

"Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kinerja birokrasi dan menghindari terjadinya tumpang tindih tugas dan

fungsi di lingkungan instansi Pemerintah yang mengakibatkan pemborosan kewenangan dan inefisiensi anggaran," jelas Tjahjoe Kumolo dalam keterangan pers secara virtual, Selasa (1/12).

Menurut Menteri PAN-RB, pengintegrasian tugas dan fungsi 10 LNS yang dibubarkan tersebut, berpotensi menghemat anggaran negara lebih dari Rp 200 miliar.

Ke-10 LNS yang dibubarkan itu terdiri Dewan Riset Nasional, Dewan Ketahanan Pangan, Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura, Badan Standardisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan, Komisi Pengawas Haji Indonesia, Komite

Ekonomi dan Industri Nasional, Badan Pertimbangan Telekomunikasi, Komisi Nasional Lanjut Usia, Badan Olahraga Profesional Indonesia, dan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia.

Sebagai tindak lanjut dari pembubaran 10 LNS, Kementerian PAN-RB segera melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan, Badan Kepegawaian Negara (BKN), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), serta kementerian dan lembaga terkait, dalam hal pengalihan tugas dan fungsi, pendanaan, pegawai, aset maupun arsip pada 10 LNS dimaksud. **(Ati)-d**

Warga

Langkah yang dilakukan tetap sama, dan itu juga untuk memudahkan melaksanakan tugas-tugas kedaruratan.

Terhadap puluhan pengungsi yang kembali ke rumah masing-masing, Edy Susanto mengatakan, sudah dilakukan pengecekan dan kenyataannya hingga Selasa siang mereka pulang kembali ke lokasi pengungsian.

Ada piket beberapa Tim Reaksi Cepat (TRC) ke lokasi, dengan mempertimbangkan ancaman bahayanya, untuk mengingatkan masyarakat bahwa status aktivitas Gunung Merapi masih Siaga, aktivitas Merapi juga masih tinggi. Karena itu warga yang masuk kelompok rentan diminta untuk kembali ke pengungsian.

Sementara itu mulai Selasa dilaksanakan Penilaian Akhir Semester (PAS) Gasal Tahun 2020 bagi SD di Kabupaten Magelang. Menurut Kepala Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang Azis Amin Mujahidin MPd, untuk tingkat SMP, sudah dilaksanakan sejak Senin (30/11) lalu. Ada puluhan siswa SD dan SMP dari kawasan lereng dan kaki Gunung Merapi wilayah Kecamatan Dukun yang sejak beberapa hari lalu hingga Selasa tinggal di lokasi pengungsian. Mereka ada yang mengikuti PAS di lokasi pengungsian secara luring.

Seperti yang dialami beberapa siswa yang tinggal di Tempat Evakuasi Akhir (TEA) Desa Deyangan, Kecamatan Mertoyudan. Kepala Desa Deyangan Risyanto mengatakan, pihaknya sudah menyediakan sarana dan jaringan internet atau WiFi. Ruangannya untuk kegiatan belajar lokasinya terpisah dengan ruangan untuk istirahat atau tinggal pengungsi. Kebiasaan memakai masker dan mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer

juga diterapkan.

Penyediaan lokasi kegiatan belajar juga dilakukan di TEA Desa Banyurojo, Mertoyudan Magelang. Sekretaris Desa Banyurojo Agus Firmansah mengatakan, sebelum siswa mengikuti ujian sekolah atau PAS, sudah disediakan beberapa fasilitas kepada anak-anak yang ikut mengungsi.

Dari Pudasalops PB BPBD Kabupaten Magelang diperoleh informasi, terjadi pengurangan jumlah pengungsi lagi. Pengungsi sebanyak 636 jiwa ada di lima titik pengungsian. Kemarin terjadi pengurangan 71 pengungsi dari Dusun Babadan II Desa Paten, Kecamatan Dukun, ada yang pulang karena mengikuti ujian sekolah atau PAS, balita pulang untuk imunisasi, ada juga yang pulang karena mengurus lahan pertanian dan ternaknya. **(Tha)-f**

Cuti

"Kita sudah bisa ambil keputusan bersama kementerian terkait. Ada Pak Menpan, Menag, Mendagri, Menaker diwakili Pak Anwar Sanusi, Kepala Staf Presiden Pak Moeldoko, juga ada dari Asisten SDM Kapolri. Intinya kita sesuai arahan putusan bahwa libur Natal dan Tahun Baru tetap ada. Libur akan ditambah pengganti Idul Fitri, 7 tutur

Muhadjir usai Rapat Tingkat Menteri secara daring bersama Mendagri Tito Karnavian, Menpan-RB Tjahjoe Kumolo, Menag Fahrul Rozi, Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi, Kepala BNPB Doni Monardo, serta Kepala Staf Presiden Moeldoko, Selasa sore (1/12).

"Dengan adanya keputusan bersama ini, cuti bersama tetap dilak-

sanakan hanya harus disertai kampanye masif mengenai pentingnya menerapkan protokol kesehatan. Di samping juga kita terus menjaga kesiapsiagaan dan bagi Kepala Daerah agar benar-benar mempersiapkan layanan kesehatan selama masa libur panjang akhir tahun nanti," tandas Menko PMK. **(Ati)-f**

RUU Minol

menyebutkan dalam satu dekade terakhir telah mengonfirmasi bahwa rata-rata konsumsi alkohol nasional justru mengalami eskalasi. Dari 35 provinsi yang disurvei, konsumsi alkohol hanya berkurang di 3 provinsi saja, yakni Kepulauan Riau (Kepri), Sumatera Selatan (Sumsel), dan Jambi. Sementara itu, di 32 provinsi lainnya, kuantitas konsumsi alkohol tendensinya bertambah.

Padahal, kalau diulik dari gatra kesehatan, minum miras berimplikasi terhadap meruyaknya angka kematian yang diakibatkannya. Menurut penelitian Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), sepanjang tahun 2008 - 2013 ada sekitar 230 korban tewas impact dari menenggak miras tak berizin. Di tahun 2014 - 2018, total korbannya naik melonjak

dua kali lipat hingga mencapai sekitar 540 orang.

Lebih dari itu, tak pelak dan tidak dipungkiri lagi, masifnya efek negatif begitu berpotensi menyumbat musabab mengonsumsi minuman beralkohol amat sangat memiriskan. Tengok saja, kian marak kejadian sehari-hari di lingkungan masyarakat dimana orang-orang yang mengonsumsi minuman beralkohol menjadi kehilangan kesadarannya. Mulai dari berbicara ngawur, melakukan pencurian, perampokan, pemerkosaan hingga pembunuhan lantaran sebelumnya mereka minum minuman beralkohol. Tak jauh berlebihan jika minuman beralkohol dikatakan sebagai sumber kejahatan.

Pelbagai insiden dari impresi oleh miras tersebut niscaya begitu

merugikan dirinya sendiri dan orang lain. Terbukti bahwasanya minol lebih banyak sisi negatifnya ketimbang aspek positifnya.

RUU Minol dapat dilanjutkan dan disahkan menjadi UU demi kepentingan generasi mendatang setidaknya dapat dikaji dari tiga perspektif, yang melandasi urgensinya keberadaan RUU a quo.. Pertama, perspektif filosofis, yakni larangan minol amatlah diperlukan dalam mewujudkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 sebagai rujukan hidup berbangsa dan bernegara. Kedua, perspektif sosial. Nyatanya, selain maraknya korban meninggal eksekusi mengonsumsi minol, juga mencuatnya keresahan dan kejahatan di tengah masyarakat. Sehingga menjadikan RUU yang terdiri atas 7 bab dan 24 pasal itu menja-

Sumbangan hal 1

di amat penting bahkan mendesak dalam rangka menciptakan kestabilan sosial. Ketiga, perspektif yuridis formal, khususnya terkait hukum pidana. Terkait perihal ini, eksistensi RUU Minol sangat urgen lantaran regulasi pidana di KUHP tak lagi adekuat. Semua telah menandakan betapa signifikansi RUU Minol untuk diterapkan di negeri ini. Pada akhirnya, dengan memberlakukan RUU Minol tersebut, berarti pemerintah Indonesia telah melakukan tanggung jawabnya sebagai pelindung masyarakat, bangsa. Dan negara karena sudah berupaya mengangkat derajat kawulanya sebagai manusia yang bermoral, berakhlak serta beretika dalam pergaulan kehidupannya. **(Penulis adalah pengamat hukum, Alumnus UMY-UGM)-d**



Prakiraan Cuaca Rabu, 2 Desember 2020						
Lokasi	Pagi	Siang	Malam	Suhu Dini Hari	Suhu C	Kelembaban
Bantul	☁	☁	☁		23-30	65-95
Sleman	☁	☁	☁		23-29	70-95
Wates	☁	☁	☁		23-30	65-95
Wonosari	☁	☁	☁		23-30	65-95
Yogyakarta	☁	☁	☁		23-30	65-95